



## Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman(PERKIM) dalam Mengatasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bukittinggi

Tiara Amelia Sepna

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putiah, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: [tiaraameliasepna13@gmail.com](mailto:tiaraameliasepna13@gmail.com)

**Abstract.** The problem of uninhabitable houses (RTLH) is a serious challenge for Bukittinggi City in improving the quality of life of low-income people. This study aims to analyze the strategies implemented by the Housing and Settlement Area Office of Bukittinggi City in tackling RTLH problems. The method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observations, and program documentation. The results showed that the main strategies implemented included a regional budget-based house renovation program, technical assistance to the community, and cross-sectoral coordination with the Health and Social Services Office. These strategies are effective in gradually reducing the number of RTLH, although they still face challenges of limited funds and implementing capacity. Community involvement and strengthening the monitoring system are key to the success and sustainability of the program. This research provides recommendations for developing funding sources, increasing human resource capacity, and optimizing technology in the implementation of the RTLH program in Bukittinggi City.

**Keywords:** PERKIM Office, RTLH, Home Improvement Program

**Abstrak.** Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi tantangan serius bagi Kota Bukittinggi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dalam menanggulangi permasalahan RTLH. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama yang dilaksanakan meliputi program bedah rumah berbasis anggaran daerah, bantuan teknis kepada masyarakat, dan koordinasi lintas sektoral dengan Dinas Kesehatan dan Pelayanan Sosial. Strategi ini efektif dalam mengurangi jumlah RTLH secara bertahap, meskipun masih menghadapi tantangan keterbatasan dana dan kapasitas pelaksana. Pelibatan masyarakat dan penguatan sistem pengawasan menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan program. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan sumber pendanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi teknologi dalam pelaksanaan program RTLH di Kota Bukittinggi.

**Kata Kunci:** Dinas PERKIM, RTLH, Program Bedah Rumah

### PENDAHULUAN

Perumahan tidak layak huni (RTLH) merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan perumahan dan permukiman yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah perkotaan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, seperti Kota Bukittinggi. Perumahan tidak layak huni didefinisikan sebagai perumahan yang tidak memenuhi standar minimum kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan fungsi sosial yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, instabilitas sosial, dan memperparah tingkat kemiskinan di masyarakat

Kondisi sosial-ekonomi dan demografi Kota Bukittinggi yang sedang mengalami urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang signifikan memberikan tekanan pada ketersediaan perumahan yang layak. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi

mengalokasikan Rp3,667 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program bedah rumah, yang menargetkan 117 unit RTLH di berbagai kecamatan. Realisasi bedah rumah pada tahun tersebut mencapai 98 unit, yang merupakan upaya strategis pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin dan rentan secara sosial-ekonomi (Medio Agusta, 2023).

Program RTLH Kota Bukittinggi pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp2,8 miliar yang telah disalurkan kepada 87 unit rumah di 17 kecamatan. Pemerintah daerah mengoptimalkan sinergi antar instansi, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, untuk menerapkan kriteria prioritas guna memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran kepada keluarga sangat miskin dan anak-anak dengan stunting. Pendekatan ini, selain hanya menangani aspek fisik perumahan, juga mengintegrasikan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari strategi pengelolaan RTLH yang komprehensif (Alfatah, 2024).

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi berperan penting dalam merancang dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengatasi permasalahan RTLH (hampir semuanya). Strategi yang dijalankan meliputi rehabilitasi, pembangunan rumah baru, bantuan teknis bagi masyarakat dalam memperbaiki rumah mereka, dan mobilisasi sumber pendanaan dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah lainnya. Program nasional seperti Program Sejuta Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Bukittinggi, sehingga memenuhi kebutuhan akan perumahan yang lebih aman dan sehat (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2024).

Lebih lanjut, transformasi Kota Bukittinggi menjadi kota terpadu dan berkelanjutan, yang didukung oleh kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, juga menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan permukiman yang tertata rapi. Konsep kota yang ramah pejalan kaki, tertib, dan dilengkapi dengan infrastruktur publik seperti taman, air bersih, pengelolaan sampah, dan infrastruktur sanitasi, merupakan bagian dari visi untuk menjadikan Bukittinggi kota yang nyaman dan berdaya saing bagi budaya dan pariwisata. Pengelolaan RTLH yang holistik menjadi prioritas untuk menjamin kualitas hidup warga dan potensi kota.

Namun, pengelolaan RTLH di Kota Bukittinggi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kompleksitas administrasi bantuan, dan beragamnya kondisi sosial ekonomi warga. Oleh karena itu, pengembangan dan evaluasi strategi dari Dinas Perumahan dan Permukiman dalam konteks lokal menjadi krusial untuk memastikan solusi yang diterapkan lebih efektif, berkelanjutan, dan efektif menjawab kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi-strategi tersebut secara mendalam guna memberikan masukan bagi penguatan kebijakan dan pelaksanaan program RTLH di Kota Bukittinggi.

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan isu serius dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan. RTLH secara umum didefinisikan sebagai perumahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, seperti struktur bangunan yang tidak aman, ventilasi yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, dan kamar-kamar yang tidak memenuhi standar minimum. Kondisi ini menimbulkan risiko kesehatan dan sosial yang serius bagi penghuni dan merupakan indikator kemiskinan yang harus segera diatasi (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2017).

Di Kota Bukittinggi, kondisi RTLH masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Pada tahun 2023, pemerintah daerah mengalokasikan Rp3,667 miliar untuk program bedah rumah yang menjangkau 117 unit RTLH di berbagai kecamatan. Program ini telah

merenovasi 98 rumah tidak layak huni, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas lingkungan hunian dan kesejahteraan masyarakat miskin. Pada tahun 2024, alokasi anggaran mencapai Rp2,8 miliar, dengan bantuan yang disalurkan kepada 87 rumah di 17 kecamatan, didukung oleh koordinasi lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial untuk memastikan sasaran bantuan yang tepat dan efektif, termasuk fokus pada keluarga miskin ekstrem dan anak-anak yang mengalami stunting (indikator kemiskinan multidimensi) (Alfatah, 2023).

Strategi penanganan RTLH di Bukittinggi meliputi rehabilitasi fisik rumah, pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan bantuan teknis bagi warga masyarakat. Pendekatan ini tidak terlepas dari peran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merancang program terpadu dan memastikan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan lembaga swasta. Dukungan dari program nasional seperti Program Sejuta Rumah yang digagas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memberikan kontribusi signifikan dengan menyediakan pendanaan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak (Rujito & Sukoharjo, 2025).

Selain itu, pengembangan kawasan permukiman yang layak juga menjadi fokus perubahan kota yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks ini, Kota Bukittinggi tergabung dalam National Urban Development Project, yang mengedepankan perencanaan terpadu dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendorong transformasi kota berkelanjutan. Perbaikan sarana prasarana pendukung seperti Mandi Cuci Kakus (MCK) yang layak, pengelolaan air bersih, dan tata ruang permukiman yang sehat merupakan bagian integral dari upaya menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan aman, mendukung peningkatan kualitas hidup warga dan daya tarik kota sebagai tujuan wisata budaya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang diterapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH). Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman mendalam tentang kebijakan, program, dan dinamika implementasi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta orang terkait lainnya. Selain itu, data diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi permukiman dan rumah tidak layak huni di beberapa kecamatan prioritas, serta dokumentasi berupa laporan program, kebijakan daerah, dan data statistik RTLH. Penelitian ini juga melakukan telaah pustaka yang relevan untuk memperkuat analisis, antara lain studi kebijakan nasional seperti Program Sejuta Rumah dan praktik rehabilitasi RTLH di daerah lain sebagai pembanding. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif dan solusi strategis terkait penanganan rumah tidak layak huni di Kota Bukittinggi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian mengenai strategi yang diterapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dalam menangani Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan bahwa program bedah rumah menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Bukittinggi mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,667 miliar untuk memperbaiki 117 unit RTLH yang tersebar di kecamatan prioritas. Realisasi program ini menghasilkan perbaikan 98 unit

rumah, yang menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mendukung penanggulangan kemiskinan melalui perumahan yang layak (Alfatah, 2023).

Lebih lanjut, pada tahun 2024 dan 2025, program ini akan berlanjut dengan alokasi anggaran yang signifikan. Pada tahun 2025, 35 unit rumah di tujuh kecamatan menerima bantuan perbaikan dengan anggaran sebesar Rp1,415 miliar. Program ini tidak hanya menyediakan dana untuk perbaikan rumah tetapi juga fasilitas pendukung seperti tangki septik bio individual untuk memastikan sanitasi yang sehat. Kriteria penerima memprioritaskan warga Bukittinggi yang memiliki tanah legal, menempati rumah secara langsung, berpenghasilan di bawah Upah Minimum Daerah (UMD), dan belum menerima bantuan serupa dalam dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa program ini dirancang dengan target yang jelas dan efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat rentan (Opik, 2025).

Hasil evaluasi implementasi strategi ini menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah (termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat telah memberikan dampak positif dalam mengurangi jumlah RTLH secara bertahap. Penganggaran yang sistematis, perencanaan yang berorientasi pada sasaran, dan pengendalian mutu proyek perbaikan rumah merupakan faktor kunci keberhasilan program. Namun, masih terdapat kendala, antara lain terbatasnya dana untuk menjangkau seluruh rumah tidak layak huni, serta tantangan dalam meningkatkan kapasitas teknis pelaksanaan dan pemantauan mutu hasil konstruksi (Alfatah, 2023).

Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Bukittinggi, yang tidak hanya bertumpu pada program renovasi rumah tetapi juga mencakup bantuan teknis, pelibatan lintas pemangku kepentingan, dan penguatan sistem pemantauan, selaras dengan kebijakan nasional Program Sejuta Rumah dan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa program di tingkat kota mampu mengikuti pedoman nasional sekaligus beradaptasi secara efektif dengan kondisi setempat. Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni dan ramah lingkungan merupakan fondasi bagi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan memperkuat daya saing kota sebagai pusat budaya dan pariwisata (Irfan Indra Pangestu, 2024).

Rekomendasi yang muncul dari studi ini adalah perlunya diversifikasi sumber pendanaan, termasuk keterlibatan sektor swasta dan lembaga donor, untuk memperluas jangkauan bantuan RTLH. Peningkatan pelatihan dan kapasitas teknis pelaksana, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan dan pelaporan, juga direkomendasikan. Terakhir, penguatan partisipasi aktif masyarakat dalam proses rehabilitasi dan pemeliharaan rumah merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bukittinggi dalam menangani RTLH telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, tetapi masih memerlukan penguatan dan inovasi lebih lanjut untuk menjangkau seluruh warga yang membutuhkan hunian layak.

Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dalam menangani permasalahan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama yang diterapkan adalah program renovasi rumah yang didukung oleh alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Program ini telah berhasil merenovasi puluhan hingga ratusan unit RTLH di berbagai kecamatan prioritas, dengan capaian tahunan yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menyediakan solusi bagi masyarakat miskin dan rentan (Alfatah, 2023).

Pelaksanaan program ini tidak terbatas pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga mencakup bantuan teknis kepada penerima manfaat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memelihara rumah secara berkelanjutan. Bantuan ini berperan krusial dalam memastikan keberlanjutan jangka panjang dan mencegah kembalinya kondisi yang tidak layak huni dengan cepat. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang pentingnya aspek sosial dalam pengelolaan RTLH (rumah bagi penyandang disabilitas), yang selama ini hanya dilihat dari aspek fisik bangunan.

Sinergi lintas sektor merupakan salah satu kekuatan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, terutama dalam koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Layanan Sosial. Hal ini memungkinkan program pengelolaan RTLH untuk juga memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan sosial keluarga, terutama dengan memprioritaskan keluarga sangat miskin dengan anak-anak yang mengalami stunting. Strategi ini sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan ke dalam setiap kebijakan dan program publik (Alfatah, 2024).

Ketersediaan anggaran yang memadai merupakan faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program. Meskipun terdapat keterbatasan, Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya meningkatkan anggaran dan melaksanakan program rehabilitasi rumah melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lainnya, termasuk dana untuk pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Hal ini mencerminkan komitmen politik di tingkat daerah, yang krusial untuk menjamin keberlanjutan program RTLH .

Namun, evaluasi pelaksanaan strategi ini juga mengungkapkan beberapa tantangan, antara lain terbatasnya cakupan anggaran untuk menjangkau seluruh RTLH di Bukittinggi yang masih cukup tinggi, kompleksitas administrasi dan verifikasi data penerima manfaat yang membutuhkan sistem data yang akurat dan terintegrasi, perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam aspek teknis rehabilitasi dan pelaksanaan program, serta perlunya pemantauan dan evaluasi yang lebih sistematis dan transparan untuk memastikan hasil program dapat dievaluasi dan perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Strategi Dinas Perkim yang mengintegrasikan partisipasi masyarakat, pelibatan pemangku kepentingan, dan sinergi antarlembaga dalam pelaksanaan program mencerminkan praktik terbaik dalam mengelola permasalahan RTLH. Hal ini sejalan dengan mandat kebijakan nasional seperti Program Sejuta Rumah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan peningkatan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan terjangkau. Lebih lanjut, pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dilengkapi infrastruktur dasar yang memadai (seperti toilet dan sistem sanitasi yang layak) merupakan bagian dari visi jangka panjang. Oleh karena itu, strategi penanganan RTLH di Bukittinggi tidak hanya mengatasi permasalahan fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Arah pengembangan strategis selanjutnya adalah diversifikasi sumber pendanaan, peningkatan inovasi teknologi dalam pelaporan dan pemantauan, serta peningkatan kapasitas pelaksanaan. Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat perlu mendapat perhatian khusus untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bukittinggi dalam menangani RTLH sudah berada pada jalur yang tepat dan telah memberikan dampak positif, meskipun masih perlu terus ditingkatkan dan diperkuat di berbagai aspek agar dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan memperoleh hasil yang lebih optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis strategi yang diterapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi dalam penanggulangan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Melalui program bedah rumah dengan dukungan APBD, banyak unit RTLH berhasil diperbaiki, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keberhasilan ini juga ditunjang oleh bantuan teknis bagi penerima manfaat serta sinergi lintas sektoral dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, sehingga penanganan RTLH mencakup aspek fisik, sosial, dan kesehatan penghuni. Strategi ini sejalan dengan kebijakan nasional, seperti Program Sejuta Rumah dan RPJMN 2020–2024. Meski demikian, tantangan masih dihadapi, terutama keterbatasan anggaran, kompleksitas administrasi dan verifikasi penerima manfaat, serta perlunya peningkatan kapasitas pelaksana dan sistem pemantauan. Ke depan, penguatan partisipasi masyarakat, peningkatan sumber daya, dan pemanfaatan teknologi perlu menjadi fokus agar program lebih optimal. Secara keseluruhan, strategi ini terbukti mampu menurunkan jumlah RTLH sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga, serta berkontribusi pada percepatan penyediaan rumah layak dan terjangkau di Kota Bukittinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfatah. (2023). *Pemkot Bukittinggi Gelar Bedah Rumah Untuk 117 Tempat Tinggal Tidak Layak Huni*.
- Alfatah. (2024). *Pemkot Bukittinggi Realisasikan Program RTLH 2024*.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2017). *Rancangan Rencana Strategi (Renstra)*. PPID Kemendagri.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. (2024). *Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. (n.d.). *Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi*. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi.
- Irfan Indra Pangestu. (2024). *Masuk 2024, Sudah Berapa Capaian Program Sejuta Rumah*.
- Medio Agusta. (2023). *Pemko Bukittinggi Bantu Perbaikan 98 Unit Rumah Tidak Layak Huni Pada 2023*.
- Opik. (2025). *35 Unit RTLH di Bukittinggi Diperbaiki Tahun 2025 Dengan Anggaran Rp1,4 M*.
- Rujito, S., & Sukoharjo, B. K. (2025). Kebijakan dan Strategi Penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(1), 32–56. <https://doi.org/10.36762/jpd.v1i1.1210>